

Katalog: 9301005.2101

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KARIMUN
MENURUT PENGELUARAN**

*Gross Regional Domestic Product of
Karimun Regency
by Expenditure*

2018-2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARIMUN**
BPS-Statistics of Karimun Regency

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KARIMUN
MENURUT PENGELUARAN**

*Gross Regional Domestic Product of
Karimun Regency
by Expenditure*

2018-2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARIMUN**
BPS-Statistics of Karimun Regency

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KARIMUN
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

ISSN : 2655-5832
Nomor Publikasi : 21010.2307
Katalog BPS : 9302020.2101
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 57 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KARIMUN
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

Tim Penyusun:

Pengarah

Donny Cahyo Wibowo, SST, M.Si

Penanggung Jawab

Agung Tika Wicaksono, S.Tr.Stat

Penyunting

Agung Tika Wicaksono, S.Tr.Stat

Naskah

Agung Tika Wicaksono

Fathanya Puja Anggaresa, S.Tr.Stat

Gambar Kulit

Ardin Feri Syukur Gultom, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Karimun. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Karimun secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun sehingga memungkinkan terbitnya buku ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Karimun, April 2023

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARIMUN
KEPALA,




Donny Cahyo Wibowo, SST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	Vii
DAFTAR TABEL	Viii
DAFTAR GAMBAR	Ix
DAFTAR LAMPIRAN	X
PENJELASAN TEKNIS	Xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar	5
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PK-LNPRT)	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori (PI)	21
2.6 Ekspor Impor	23
III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN KARIMUN MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018-2022	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	32
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KARIMUN 2018-2022	41
4.1 PDRB (Nominal)	43
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga terhadap PDRB	44
4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	45
V. LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	28
Tabel 2	PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	29
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022	30
Tabel 4	Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun 2018-2022	32
Tabel 5	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Karimun 2018-2022	33
Tabel 6	Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Karimun 2018-2022	35
Tabel 7	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Karimun 2018-2022	36
Tabel 8	Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten karimun 2018-2022	37
Tabel 9	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Karimun 2018-2022	38
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Karimun 2018-2022	39
Tabel 11	PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Karimun 2018-2022	43
Tabel 12	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Karimun 2018-2022	44
Tabel 13	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	45

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Grafik 1	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun 2018-2022	28
Grafik 2	Distribusi PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun 2018-2022	30
Grafik 3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Karimun 2018-2022	31

<https://karimunkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Tahun 2018-2022	49
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan menurut pengeluaran, Tahun 2018-2022	50
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)	51
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)	52
Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun tahun 2018-2022 Seri 2010 menurut Pengeluaran	53
Lampiran 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun tahun 2018-2022 Seri 2010 Menurut Pengeluaran	54

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut pengeluaran dirinci menurut total pengeluaran komponen akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran akhir pemerintah, pengeluaran akhir Lembaga Non Profit (LNPR), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor netto.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregatturnya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke -1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke -1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
8. **Output** adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya.
9. **Upah/gaji** adalah nilai tambah yang dibayarkan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja (termasuk didalamnya imputasi upah dan gaji).
10. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.



PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independendengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun, karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain be beda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (Income)	=	PDRB Produksi
C (Consumption)	=	Konsumsi Akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial

global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;

- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan, sebagai berikut:

Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;

Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;

Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;

Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Konsep dan Cakupan

- a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawas dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran¹. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, embakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

¹ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS

Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS

Sensus Penduduk 2010, BPS

Data Sekunder (dari dalam maupun luar

BPS) Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan ber entuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/ Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. **Pendahuluan**

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda

- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned}
 \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{ Output -} \\
 & \text{Penjualan barang dan jasa +} \\
 & \text{Social transfer in kind purchased market production +} \\
 & \text{Output Bank Indonesia}
 \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayatiyangdibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai ia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan

usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun, bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS; Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;

Data komoditas perkebunan;

Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;

Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;

Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)}}{\text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR-IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dikesuatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhannya domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



3

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN KARIMUN
MENURUT PENGELUARAN 2018
- 2022**

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2013, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Pandemi *Covid-19* yang sebelumnya melanda, kini berangsur pulih dan sudah memasuki era pasca *Covid-19*, tidak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun mencapai angka 4,38 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,37 persen. Meskipun begitu, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun secara umum mengalami penurunan, bermula dari 5,05 persen di tahun 2018, dan secara berturut-turut selalu mengalami perlambatan setiap tahun dengan angka sebagai berikut: 4,89 persen (2019); -3,59 persen (2020). Kondisi pasca pandemi *Covid-19* tahun 2022 dinilai belum dapat menyamai kondisi sebelum pandemi *Covid-19* di tahun 2019.

Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dapat mencapai angka 28,14 persen.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun didominasi pertumbuhan komponen pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang menyumbang hampir dari separuh total PDRB. Selain itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya dan penurunan realisasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Karimun, terkhusus pada belanja pegawai dan perubahan alokasi belanja yang lebih difokuskan kepada infrastruktur daerah.

Pada periode tahun 2018–2022 PDRB Kabupaten Karimun baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Harga Konstan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, hal tersebut jelas dipengaruhi oleh perlambatan yang terjadi pada perekonomian di Kabupaten Karimun selama tiga tahun terakhir. Namun, pada tahun keempat dan kelima, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan karena mulai memasuki masa pemulihan pasca *Covid-19*.

Pada tahun 2018, PDRB Kabupaten Karimun Atas Harga Berlaku sebesar 12.628,78 miliar rupiah dan menjadi 15.554,49 miliar rupiah di tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Jika dilihat dari sisi PDRB Atas Dasar Harga konstan tanpa adanya pengaruh inflasi di dalamnya, pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Karimun sebesar 9.016,34 miliar rupiah dan menjadi 9.741,85 miliar rupiah di tahun 2022. Peningkatan PDRB dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Karimun pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun
Tahun 2018 - 2022**

Table 1. GRDP at Current Price by Expenditure, Karimun Regency 2018-2022

(Juta Rp/Million Rp)

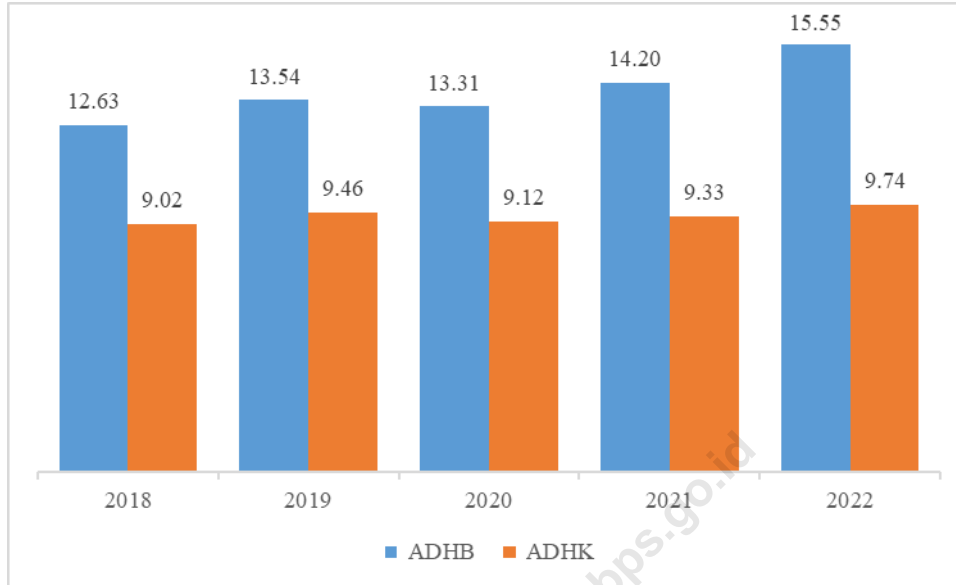
Komponen Pengeluaran / Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	7.827.508,14	8.511.272,42	8.636.975,42	8.938.008,89	9.853.919,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	127.333,43	141.730,72	144.598,56	144.977,19	154.995,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	1.645.635,48	1.723.079,97	1.644.001,45	1.633.299,34	1.627.828,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4.700.786,16	4.999.312,43	5.069.368,50	5.378.991,00	5.711.085,09
5. Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	11.484,90	30.848,73	12.751,74	53.887,13	153.392,25
6. Ekspor Neto / <i>Nett Export</i>	-1.683.965,61	-1.862.073,00	-2.197.065,49	-1.953.422,21	-1.946.722,97
P D R B / G D R P	12.628.782.50	13.544.171.26	13.310.630.17	14.195.741.34	15.554.497.43

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Karimun pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari grafik 1 dan tabel 2 berikut ini:

Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun 2018-2022

Figure 1. Comparing GRDP at Current Price and GRDP at Constant Price, Karimun Regency 2018-2022

(Triliun rupiah)



Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun Tahun 2018 - 2022

Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Karimun Regency 2018-2022

(Juta Rp/Million Rp)

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption	4.945.663,86	5.323.057,31	5.620.736,01	5.570.683,12	5.652.934,92
2. Konsumsi LNPRT/NPISH Consumption	79.751,97	92.632,76	99.748,20	101.083,88	99.241,89
3. Konsumsi Pemerintah/Government Consumption	1.129.516,23	1.171.749,81	1.215.617,92	1.167.651,60	1.128.811,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Gross Fixed Capital Formation	3.026.142,90	3.385.968,22	3.687.592,76	3.728.641,38	3.835.028,71
5. Perubahan Inventori/Changes of Inventory	5.884,94	8.365,70	22.238,30	9.646,20	38.716,70
6. Ekspor Neto/Nett Export	-603.819,08	-965.430,74	-1.189.014,69	-1.460.586,89	-1.421.962,28
PDRB/GRDP	8.583.140,81	9.016.343,06	9.456.918,50	9.117.119,28	9.332.771,13

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu dua tahun mengalami peningkatan, yakni sebesar 9.016,34 miliar rupiah (2018) dan 9.456,92 miliar rupiah (2019). Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 9.117,12 miliar rupiah sebelum akhirnya naik kembali pada tahun 2021 sebesar 9.332,77 dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar 9.741,85 miliar rupiah. Jika dilihat dari grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Karimun, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir Rumah Tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 36 s.d 38 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 73 s.d 91 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 87 s.d 104,50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun 2018 - 2022

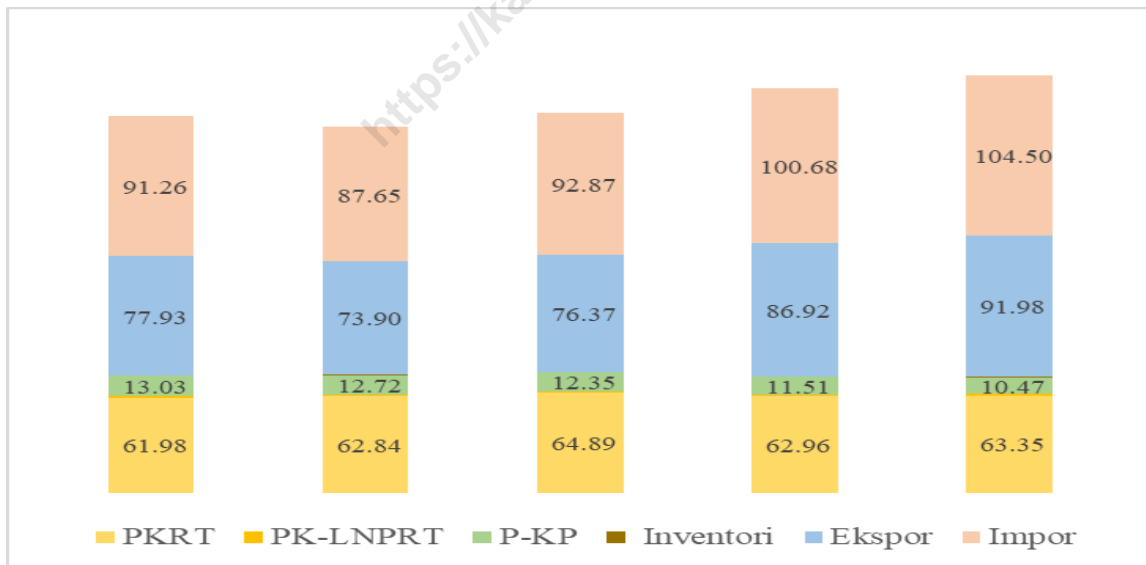
Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Karimun Regency 2018-2022

%

Komponen Pengeluaran / <i>Expenditure item</i>	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	61,98	62,84	64,89	62,96	63,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	1,01	1,05	1,09	1,02	1,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	13,03	12,72	12,35	11,51	10,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	37,22	36,91	38,09	37,89	36,72
5. Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	0,09	0,23	0,10	0,38	0,99
6. Ekspor Neto / <i>Nett Export</i>	-13,33	-13,75	-16,51	-13,76	-12,52
PDRB / <i>GDRP</i>	100	100	100	100	100

Grafik 2. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun 2018 - 2022

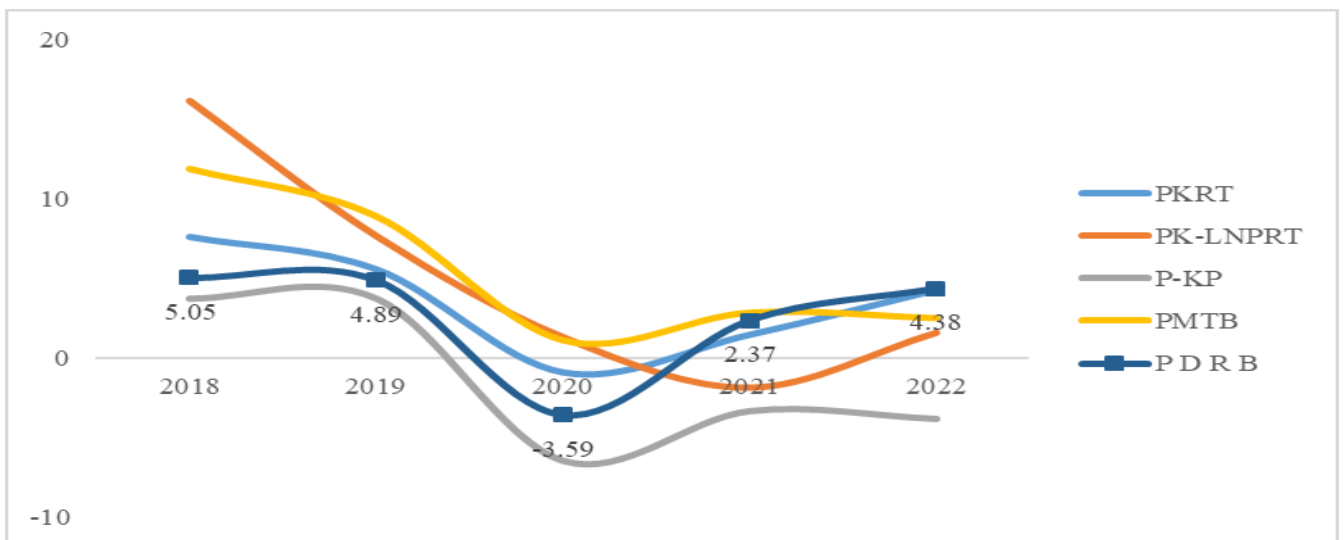
Figure 2. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Karimun Regency 2018-2022



Konsumsi rumah tangga (PK-RT) masih menjadi penggerak utama roda perekonomian di Kabupaten Karimun tahun 2022. *Share* yang diberikan konsumsi rumah tangga mencapai 63,35 persen terhadap PDRB Kabupaten Karimun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kabupaten Karimun sebesar 36,72 persen, Adapun *share* yang diberikan oleh konsumsi pemerintah (PK-P) hanya sebesar 10,47 persen di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar.

Di sisi lain, pada tahun 2018-2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugikan dari sisi ekonomi maupun produsen. Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2018-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun mengalami penurunan di tiga tahun dan mengalami peningkatan di dua tahun terakhir, yakni sebesar 5,05 persen (2018); 4,89 persen (2019); -3,59 persen (2020); 2,37 persen (2021); serta 4,38 persen (2022).

Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun 2018 - 2022
Figure 3. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Karimun Regency 2018-2022



Berdasarkan grafik 3, dapat dilihat lebih dalam terkait laju pertumbuhan di masing-masing komponen penyusunnya. Secara umum, seluruh komponen pengeluaran kecuali komponen pengeluaran konsumsi LNPRT cenderung memiliki pola yang sama dan fluktuatif tiap tahunnya. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2018 karena adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak yang berdampak besar terhadap pengeluaran konsumsi LNPRT, kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun selanjutnya sampai akhirnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2022, mengingat ada banyak kegiatan besar yang akan dimulai kembali pasca pandemi Covid-19. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi anggaran APBD di Pemerintah Karimun, terkhusus pada belanja pegawai karena terdapat lebih dari 9.000 honorer yang secara bertahap diberhentikan. Untuk laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 terjadi. Fenomena ini dapat terjadi karena daya beli masyarakat Kabupaten Karimun mulai kembali setelah pandemi Covid-19. Ekonomi berangsur-angsur membaik sehingga konsumsi masyarakat meningkat dan mempengaruhi PDRB Kabupaten Karimun di tahun 2022.

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (Rumah Tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 4 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2018 – 2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen di Kabupaten Karimun.

Tabel 4. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran, Kabupaten Karimun 2018 - 2022
Table 4. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Karimun Regency 2018-2022

Komponen Pengeluaran / Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	147,05	151,43	155,04	158,11	167,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	137,46	142,09	143,05	146,08	153,69
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	140,44	141,75	144,55	148,55	153,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	138,83	135,57	135,96	140,26	145,28
5. Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	137,29	138,72	133,53	139,18	145,68
6. Ekspor Neto / <i>Nett Export</i>	174,43	156,61	153,63	140,27	144,36
P D R B / G D R P	140,07	143,22	146,00	152,11	159,67

PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh Rumah Tangga, LNPRRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Karimun untuk periode 2018-2022. Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Karimun, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Rumah Tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Karimun maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh Rumah Tangga.

Tabel 5. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 5. Trend of Using on Final Household Consumption of Karimun Regency 2018–2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/ Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp/Billion Rp)	7.827,51	8.511,27	8.636,98	8.938,01	9.853,92
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Miliar Rp/Billion Rp)	5.323,06	5.620,74	5.570,68	5.652,93	5.895,47
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	61,98	62,84	64,89	62,96	63,35
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	33864,06	36560,92	34076,69	34449,57	37.019,76
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	23029,08	24144,37	21978,81	21787,98	22.148,43
Pertumbuhan/ Growth					
a. Perkapita/ Per capita	6,72	4,84	-8,97	-0,24	1,75
Jumlah penduduk/ Number of population (000 orang/person)	231,15	232,80	253,46	259,45	266,18

Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir Rumah Tangga mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi Rumah Tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2018-2022 proporsi pengeluaran konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 peran konsumsi Rumah Tangga sebesar 61,98 persen dan terus meningkat mencapai 64,89 persen pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan ke 62,96 persen di tahun 2021, proporsi pengeluaran konsumsi Rumah Tangga kembali meningkat menjadi 63,35 persen di tahun 2022. Semakin tingginya proporsi pengeluaran konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa konsumsi Rumah Tangga menjadi motor penggerak utama terhadap perekonomian Kabupaten Karimun. Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi Rumah Tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi Rumah Tangga. Namun, semakin tinggi konsumsi Rumah Tangga dibandingkan komponen lainnya dalam penyusunan PDRB juga patut untuk di waspadai. Hal ini disebabkan masih lemahnya peran dunia industri dalam mendongkrak perekonomian.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kabupaten Karimun menghabiskan dana sekitar 33,86 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 36,27 juta rupiah (2019); 34,15 juta rupiah (2020); 34,45 juta rupiah (2021); dan 37,02 juta rupiah (2022). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per Rumah Tangga tumbuh pada kisaran -0,308 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 4,16 persen tetapi melambat di tahun 2019 sampai tahun 2021, namun kembali meningkat di tahun 2022. Secara umum pada tahun 2018-2022, peningkatan yang terjadi pada pengeluaran konsumsi Rumah Tangga cenderung searah dengan meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan ini tentunya berdampak pada pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010. Namun, apabila dirinci lebih dalam, pada tahun 2020, kenaikan pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk, baik secara kuantitas maupun secara nilai (termasuk penurunan kualitas). Hal tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi Rumah Tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 6. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Karimun Regency 2018 – 2022

Kelompok Konsumsi / Consumption Group	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	55,45	56,20	57,44	57,48	58,60
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	2,50	2,47	2,36	2,40	2,33
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	11,40	11,07	11,26	10,68	10,32
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	6,17	6,52	6,55	6,68	6,40
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	18,77	18,17	16,78	16,95	16,85
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	1,41	1,37	1,25	1,24	1,25
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	4,31	4,20	4,37	4,58	4,26
Total Konsumsi/ Consumption Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^a Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Jika dilihat lebih dalam, konsumsi rumah tangga terbesar berupa Makanan, Minuman, dan Rokok. *Share* yang diberikan oleh subkategori Makanan, Minuman, Rokok selalu lebih dari 55 persen terhadap total konsumsi Rumah Tangga. Meningkatnya konsumsi Makanan; Minuman; dan Rokok cenderung sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Karimun setiap tahunnya. Besarnya total konsumsi Rumah Tangga berupa Makan; Minum; dan Rokok, Perlengkapan Rumah Tangga serta kebutuhan lainnya hingga konsumsi hotel dan restoran mengindikasikan bahwa kecenderungan pengeluaran Rumah Tangga berupa konsumsi akhir berupa pemenuhan keperluan pribadi bukan *savings*.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 7. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Karimun Regency 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	127.333,43	141.730,72	144.598,56	144.977,19	154.995,77
b. ADHK 2010 / <i>2010 Constant Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	92.632,76	99.748,20	101.083,88	99.241,89	100.847,23
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i> (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	1,01	1,05	1,09	1,02	1,00
Pertumbuhan (ADHK 2010)	16,15	7,68	1,34	-1,82	1,62

Total pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sebesar 127.333,43 juta rupiah, yang kemudian selalu meningkat di tahun tahun berikutnya yakni 141.730,72 juta rupiah (2019); 144.598,56 juta rupiah (2020); 144.977,19 juta rupiah (2021); dan 154.995,77 juta rupiah (2022). Adapun pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah 16,15 persen (2018); 7,68 persen (2019); 1,34 persen (2020), -1.82 persen (2021), dan 1,62 persen (2022). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni mencapai 16,15 persen. Tingginya pertumbuhan LNPRT di tahun 2018 disebabkan oleh adanya Pemilihan Umum (pemilu) serentak pada tahun 2019, sehingga pengeluaran LNPRT parpol dalam mempersiapkan pemilu mendominasi terhadap total pengeluaran LNPRT secara keseluruhan.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 8. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Karimun Regency 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Miliar Rp/ <i>Billion Rp</i>)	1.645,64	1.723,08	1.644,00	1.633,30	1.627,83
b. ADHK 2010 / <i>2010 Constant Prices</i> (Miliar Rp/ <i>Billion Rp</i>)	1.171,75	1.215,62	1.137,29	1.099,46	1.057,51
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i> (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	13,03	12,72	12,35	11,51	10,47

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan penurunan walaupun sedikit meningkat di tahun 2019, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.645,64 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar, 1.723,08 miliar rupiah (2019); 1.644 miliar rupiah (2020), 1.633,30 miliar rupiah (2021), dan 1.627,83 miliar rupiah (2022). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami penurunan pada masing-masing tahun kecuali pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan penurunan baik secara keseluruhan maupun rata-rata. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan motor penggerak perekonomian Kabupaten Karimun ketiga setelah pengeluaran konsumsi Rumah Tangga dan PMTB.

Sama seperti gambaran total pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan hampir disetiap tahun, *share* yang diberikan oleh kategori pengeluaran pemerintah terhadap PDRB pun mengalami penurunan. Pada tahun 2018, *share* pengeluaran pemerintah mencapai 13,03 persen dan menjadi 10,47 persen pada tahun 2022.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. PMTB Kabupaten Karimun menunjukkan peningkatan pertumbuhan baik secara nominal maupun riil selama kurun waktu 2018 sampai 2022. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 11,89 persen, hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan investasi yang ditopang oleh maraknya pembangunan infrastruktur dan investasi swasta. Tingginya angka investasi tersebut tentu memberikan *multiplier effect* yang positif terhadap total perekonomian Kabupaten Karimun. Di tahun 2022 sendiri, pertumbuhan PMTB mencapai 2,51 persen yang disebabkan oleh sektor-sektor riil mulai kembali bergerak.

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 9. Trend and Structure of GFCF Karimun Regency 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Miliar Rp/Billion Rp)	4.700,79	4.999,31	5.069,37	5.378,99	5.711,09
b. ADHK 2010 / <i>2010 Constant Prices</i> (Miliar Rp/Billion Rp)	3.385,97	3.687,59	3.728,64	3.835,03	3.931,22
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i>					
(% ADHB / <i>Current Prices</i>)	37,22	36,91	38,09	37,89	36,72
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	3.207,87	3.494,62	3.695,49	4.010,49	4.231,74
(%)	25,40	25,80	27,76	28,25	27,21
b. Non Bangunan (Miliar Rp/Billion Rp)	1.492,91	1.504,69	1.373,88	1.368,50	1.479,34
(%)	11,82	11,11	10,32	9,64	9,51
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	10,28	7,81	5,42	5,30	2,12
b. Non Bangunan	15,47	11,24	-7,72	-2,88	3,49
c. Total PMTB	11,89	8,91	1,11	2,85	2,51

9 Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

10 Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

11 Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 10. Trend and Structure of Changes in Inventories, Karimun Regency 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	11.484,90	30.848,73	12.751,74	53.887,13	153.392,25
b. ADHK 2010 / <i>2010 Constant Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	8.365,70	22.238,30	9.549,74	38.716,70	105.296,63
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i> (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	0,09	0,23	0,10	0,38	0,99

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya. Selama tahun 2018-2022 *share* yang diberikan oleh perubahan inventori terhadap PDRB Kabupaten Karimun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 11.484,90 juta rupiah dan mengalami kenaikan pesat di tahun 2019 menjadi 30.848,73 juta rupiah. Namun, kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 mempengaruhi seluruh lini perekonomian, termasuk perubahan inventori yang hanya mencapai 12.751,74 juta rupiah saja. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 yakni sebesar 53.887,13 dan kembali meningkat pesat di tahun 2022 sebesar 153.392,25 juta rupiah. Semakin meningkatnya perubahan inventori/*stock* yang terjadi menunjukkan agak terhambatnya kegiatan perekonomian dalam kategori perdagangan.



**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN KARIMUN
2018 - 2022**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Karimun, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita. Data PDRB per kapita selain digunakan sebagai indikator kesejahteraan juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah, untuk kemudian diperbandingkan dengan wilayah lainnya.

Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Karimun 2018-2022
Table 11. Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Karimun Regency 2017 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiah/billion rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current prices	12.628,78	13.544,17	13.310,63	14.195,74	15.554,5
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	9.016,34	9.456,92	9.117,12	9.332,77	9.741,849
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiah/million rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current prices	54,64	57,73	52,64	54,71	58,44
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	39,01	40,31	36,06	35,97	36,60
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of per capita GRDP at 2010 constant price	4,16	3,33	-10,54	-0,24	1,75
Jumlah Penduduk/Population (ribu orang/thousand people)	231,15	234,62	252,86	259,45	266,18

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Karimun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 13), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara agregat setiap penduduk Kabupaten Karimun rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu, pertumbuhan perkapita 2022 secara “riil” tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. PDRB ADHK perkapita Kabupaten Karimun mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen pada tahun 2022 dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2,59 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita yang setara dengan pertumbuhan jumlah penduduk menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan kapasitas produksi dari tiap individu tidak saja secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa konsumsi akhir baik dari rumah tangga, pemerintah, maupun LNPRT sudah mampu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Karimun. *Share* yang diberikan oleh ketiga kategori tersebut disetiap tahunnya mencapai 74,81 persen hingga 78,32 persen dalam waktu lima tahun terakhir.

Tabel 12. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Karimun, 2018-2022

Table 12. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP Karimun Regency 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	7.827,51	8.511,27	8.636,98	8.938,01	9.853,92
b. LNPRT	127,33	141,73	144,60	144,98	155,00
c. Pemerintah	1.645,64	1.723,08	1.644,00	1.633,30	1.627,83
Jumlah	9.600,48	10.376,08	10.425,58	10.716,29	11.636,74
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	12.628,78	13.544,17	13.310,63	14.195,74	15.554,50
Proporsi	76,02	76,61	78,32	75,48	74,81

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{K}{Y} = \frac{I}{Y} = \frac{I_t}{Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke -1

**Tabel 13. Incremental Capital Output Ratio,
Kabupaten Karimun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	9 016,34	9 456,92	9 117,12	9 332,77	9741,85
Perubahan (miliar rupiah)	433,20	440,58	-339,80	215,65	409,08
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	3 385,97	3 687,59	3 728,64	3 835,03	3.931,22
ICOR	7,82	8,37	-10,97	17,78	9,61

Data di atas menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Karimun selama periode 2018 sampai dengan 2022 berada pada kisaran angka -10,97 hingga 17,78. Nilai ICOR 9,61 pada tahun 2022 diartikan bahwa setiap penambahan *output* dibutuhkan minimal 9 unit PMTB. ICOR juga dapat menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang ditambahkan untuk mencapai penambahan PDRB tertentu. Tentunya semakin besar nilai ICOR semakin menunjukkan inefisiensi penambahan modal untuk meningkatkan PDRB.

<https://karimunkab.bps.go.id>



LAMPIRAN



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Pengeluaran di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022**

(Miliar Rupiah)

Komponen	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.827,51	8.511,27	8.636,98	8.938,01	9.853,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	127,33	141,73	144,60	144,98	155,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.645,64	1.723,08	1.687,89	1.676,90	1.627,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.700,79	4.999,31	5.069,37	5.378,99	5.711,09
5. Perubahan Inventori	11,48	30,85	12,26	53,89	153,39
6. Net Ekspor	(1.683,97)	(1.862,07)	(2.240,46)	(1.997,02)	(-1,946.72)
PDRB	12.628,78	13.544,17	13.310,63	14.195,74	15.554.50

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 menurut Pengeluaran di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022**

(Miliar Rupiah)

Komponen	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.323,06	5.620,74	5.570,68	5.652,93	5,895.47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	92,63	99,75	101,08	99,24	100.85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.171,75	1.215,62	1.167,65	1.128,81	1,057.51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.385,97	3.687,59	3.728,64	3.835,03	3,931.22
5. Perubahan Inventori	8,37	22,24	9,65	38,72	105.30
6. Net Ekspor	-965,43	1.189,01	-1.460,59	-1.421,96	-1,348.50
PDRB	9.016,34	9.456,92	9.117,12	9.332,77	9,741.85

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022

(Persen)

Komponen	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,98	62,84	64,89	62,96	63,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,01	1,05	1,09	1,02	1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,03	12,72	12,68	11,81	10,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,22	36,91	38,09	37,89	36,72
5. Perubahan Inventori	0,09	0,23	0,09	0,38	0,99
6. Net Ekspor	(13,33)	(13,75)	(16,51)	(13,76)	(12,52)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022

(Persen)

Komponen	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,63	5,59	(0,89)	1,48	4,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16,15	7,68	1,34	(1,82)	1,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,74	3,74	(3,95)	(3,33)	(3,82)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,89	8,91	1,11	2,85	2,51
PDRB	5,05	4,89	(3,59)	2,37	4,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://karimunkab.bps.go.id>

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) menurut Pengeluaran di Kabupaten Karimun Tahun 2018-
2022**

Komponen	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	147,05	151,43	155,04	158,11	167,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	137,46	142,09	143,05	146,08	153,69
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	140,44	141,75	144,55	148,55	153,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,83	135,57	135,96	140,26	145,28
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	140,07	143,22	146,00	152,11	159,67

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022

Komponen	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah	3,05	2,98	2,39	1,98	5.71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,56	3,37	0,68	2,12	5.21
3. Pengeluaran Konsumsi		93	1,98	2,77	3.62
		25	0,28	3,16	3.58
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		25	1,94	4,19	4,97

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://karimunkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARIMUN
BPS-Statistics of Karimun Regency
Komplek Perkantoran Pemkab Karimun
Jalan Jend. Sudirman - Poros
Provinsi Kepulauan Riau 29661 Telp./Fax (0777) 7366027
Email: bps2101@bps.go.id Homepage: karimunkab.bps.go.id

